

## **Strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program lanjut usia terlantar di Sendangmulyo**

Nadia Zulva Pratiwi  
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
[nadiazulva.2019@student.uny.ac.id](mailto:nadiazulva.2019@student.uny.ac.id)

Novianto Yudha Laksana  
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
[laksananyudha@uny.ac.id](mailto:laksananyudha@uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan program Lanjut Usia Terlantar di Sendangmulyo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Dalam penentuan sample, Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriteria yang sudah ditentukan dan terdapat 5 orang sebagai informan utama. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, serta teknik analisis data menggunakan Model Miles and Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar di Sendangmulyo dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu pendataan, penyandingan data, verifikasi dan validasi data, dan pendampingan penyaluran program dibantu oleh TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sebagai komunikator program Lanjut Usia Terlantar (LUT). Hambatan penelitian ini adalah hambatan semantic. Implementasi penyaluran program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini kurang efisien dan tersistem. Namun terdapat peningkatan kualitas program Lanjut Usia Terlantar (LUT) dari tahun ke tahun.

**Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pelaksanaan program, Lanjut Usia Terlantar**

### **Abstract**

*This research aims to determine the communication strategy of the Sleman Regency Social Service in optimizing the Neglected Elderly program in Sendangmulyo. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection methods used are observation, structured interviews and documentation. In determining the sample, the technique used was purposive sampling with predetermined criteria and there were 5 people as the main informants. Data validity techniques in this study used source triangulation techniques, as well as data analysis techniques using the Miles and Hubberman Model. The results showed that the communication strategy bt the Sleman Regency Social Service in optimizing the implementation of the Neglected Elderly program in Sendangmulyo was carried out in 4 stages, namely data collection, data matching, data verification and validation, and program distribution assistance assisted bt TPSK (Kalurahan Social Asisstence Workers) and TKSK (District Social Welfare Workers) as the communicator of the Neglected Elderly Program (LUT). The obstacle of this research is the semantic barrier. In implementing the distribution of the Neglected Elderly (LUT) program, it is less efficient and systemized. However, there has been an increase in the quality of the Neglected Elderly (LUT) program from year to year.*

**Keywords : Communication Strategy, Program Implementation, Neglected Elderly**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per Juni 2022 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 275.361.267 jiwa dan menduduki peringkat ke 4 sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk di Indonesia ini akan mempengaruhi keadaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dengan timbulnya suatu masalah sosial. Salah satu dampak dari tingginya tingkat kepadatan penduduk di Indonesia adalah kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja (Priseptian & Primandhana, 2022). Fenomena kemiskinan ini menjadi dampak dari peningkatan pertumbuhan penduduk akibat krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan (Putri N, 2021:4).

Kemiskinan menjadi sebuah masalah utama bagi beberapa negara berkembang yang ada di dunia. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Dimensi kemiskinan menurut Effendi, kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku (Susiaturun, 2018). Kemiskinan sekelompok orang di kaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Berdasarkan pengertian tersebut, kemiskinan bukan lagi merupakan sebuah persoalan baru, melainkan persoalan umum yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, dan agama masyarakat.

Selama ini pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menurunkan angka kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Berbagai program baik itu berupa

pemberdayaan maupun bantuan sosial telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Akan tetapi, program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum dapat dikatakan berhasil secara maksimal. Hal ini didukung dengan informasi yang dilansir dari Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyampaikan bahwa selama ini program pengentasan kemiskinan dianggap kurang dapat tepat sasaran dikarenakan minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral (Humas MENPANRB, 2022). Berawal dari kegagalan pemerintah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan, maka diperlukan strategi yang jitu, berkelanjutan dan masif dalam menangani problematika kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2022 mencapai angka 9,57 persen, dimana angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin terhadap bulan Maret 2022 yang mencapai 9,54%. Sementara itu, berdasarkan data keluarga miskin dan rentan miskin Dinas Sosial Kabupaten Sleman, jumlah kepala keluarga yang berada di Kabupaten Sleman per tahun 2021 tercatat sejumlah 371.293 kepala keluarga, dimana sejumlah 33.788 tercatat sebagai keluarga miskin dan 130.447 tercatat sebagai keluarga rentan miskin (bps.go.id). Dari data tersebut diperoleh persentase keluarga miskin terhadap jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Sleman sejumlah 9,10%. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah kepala keluarga yang tercatat sebagai keluarga miskin dan rentan miskin berjumlah 191.258 keluarga. Dengan demikian, terdapat peningkatan jumlah keluarga miskin sebanyak 27.023 keluarga yang termasuk keluarga miskin dan rentan miskin yang berada di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta dengan memiliki 17 kapanewon (kecamatan) yang membutuhkan uluran tangan pemerintah dalam hal mengurangi angka kemiskinan. Ketujuh belas kapanewon yang terdapat di Sleman yakni, Gamping, Godean, Moyudan, Minggir, Seyegan, Mlati, Depok, Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Berdasarkan data keluarga miskin dan rentan miskin Dinas Sosial Kabupaten

Sleman, dari 17 kapanewon tersebut terdapat beberapa kapanewon yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, salah satunya adalah Kapanewon Minggir setelah Kapanewon Seyegan yang memiliki presentase tertinggi (Dokumen Rekap Data Kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman). Hal tersebut menjadi alasan Peneliti untuk melakukan penelitian di Kapanewon Minggir.

Kapanewon Minggir merupakan salah satu kapanewon yang berada di ujung barat daerah Kabupaten Sleman dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo. Kapanewon Minggir memiliki lima kalurahan diantaranya Kalurahan Sendangarum, Kalurahan Sendangmulyo, Kalurahan Sendangrejo, Kalurahan Sendangsari, dan Kalurahan Sendangagung. Namun, dari beberapa kalurahan yang berada di Kapanewon Minggir, terdapat satu kalurahan yang memiliki tingkat persentase kemiskinan yang cukup tinggi yaitu Kalurahan Sendangmulyo. Hal ini kontradiktif dengan fakta bahwa Kalurahan Sendangmulyo memiliki potensi ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Berdasarkan website resmi Kalurahan Sendangmulyo, Kalurahan Sendangmulyo merupakan kalurahan yang memiliki wilayah paling luas di Kapanewon Minggir dengan luas 634,5335 Ha dan memiliki jumlah penduduk 7248 jiwa atau sejumlah 2513 kepala keluarga per bulan Januari tahun 2023 ([sendangmulyosid.slemankab.go.id/first](http://sendangmulyosid.slemankab.go.id/first)).

Kalurahan Sendangmulyo menjadi kalurahan yang lebih unggul dan maju dibandingkan dengan kalurahan lain yang berada di Kapanewon Minggir. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kegiatan atau potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Sendangmulyo seperti menjadi desa wisata, memiliki potensi budaya, kesenian, kerajinan, kuliner, dan kegiatan *live in*. Selain itu, Kalurahan Sendangmulyo juga merupakan desa yang memiliki produk kerajinan yang terbuat dari bambu. Produk kerajinan yang terbuat dari bambu ini diinovasikan dan dikreasikan oleh masyarakat menjadi berbagai peralatan rumah tangga seperti: besek, tudung tambur, rantang tumpuk, dompet, keranjang, tempat sendok/garpu, rantang omplong, tempat perhiasan dan masih banyak produk lainnya. Dengan adanya potensi kerajinan bambu ini kemudian dikembangkan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian Kalurahan Sendangmulyo. Kalurahan

Sendangmulyo masih menjadi kalurahan yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Kapanewon Minggir padahal Kalurahan Sendangmulyo memiliki potensi usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalurahan Sendangmulyo memiliki persentase miskin terhadap jumlah KK sebesar 15,40% dan presentase tersebut merupakan presentase tertinggi dibandingkan dengan Kalurahan lain yang berada di Kecamatan Minggir. Berikut data kemiskinan Tahun 2021 di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Kalurahan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase	Jumlah KK Rentan Miskin	Jumlah KK Rentan Miskin Persentase	Jumlah KK Rentan Miskin Persentase
1. Sendangarum	1.177	1.098	93,28%	1.024	86,92%	86,92%
2. Sendangmulyo	2.513	391	15,56%	387	15,40%	15,40%
3. Sendangrejo	1.245	207	16,63%	199	15,98%	15,98%
4. Sendangsari	1.031	129	12,51%	124	12,02%	12,02%
5. Sendangagung	2.286	414	18,13%	394	17,28%	17,28%

Gambar 1. 1. Data Kemiskinan Kapanewon Minggir Tahun 2021

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Berdasarkan data kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Sleman di tahun 2021 Kalurahan Sendangmulyo memiliki 387 kepala keluarga miskin dan 1.206 kepala keluarga rentan miskin atau memiliki 15,40% kepala keluarga miskin. Tingginya persentase kemiskinan yang dimiliki oleh Kalurahan Sendangmulyo ini memerlukan pengkajian lebih lanjut lagi terkait dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, Kalurahan Sendangmulyo ini juga menempati peringkat 7 sebagai kalurahan yang memiliki persentase kemiskinan paling tinggi di 86 kalurahan yang berada di Kabupaten Sleman. Melihat problematika tersebut, diperlukan suatu strategi komunikasi yang mampu mengurangi angka kemiskinan di Kalurahan Sendangmulyo.

Hingga saat ini, Kabupaten Sleman telah memiliki berbagai program yang ditujukan sebagai upaya pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu instansi yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Dinas Sosial Kabupaten Sleman merupakan lembaga pemerintahan yang melayani segala keluhan masalah masyarakat terkait dengan masalah kemiskinan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Sleman hadir untuk membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang dimilikinya. Dalam upaya mengatasi kemiskinan Dinas Sosial memiliki beberapa program diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Disabilitas, Program Anak Terlantar, Program Lansia Terlantar, Program Anak Yatim Piatu, dan lain sebagainya.

Program Lanjut Usia Terlantar (LUT) merupakan salah satu program Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Pada awalnya program Lanjut Usia Terlantar ini bernama Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar. Namun pada tahun 2020, nama program ini diubah menjadi Program Lanjut Usia Terlantar (LUT). Program Lanjut Usia Terlantar ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai definisi, tujuan dan sasaran dari program Asistensi Sosial Lanjut Usia.

Program Lanjut Usia Terlantar ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pada kalangan lanjut usia. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada Lanjut Usia Terlantar (LUT) untuk memenuhi kebutuhan sandang dan makanan. Program Lanjut Usia Terlantar ini memiliki beberapa kriteria diantaranya (1) calon penerima bantuan minimal berusia 60 tahun; (2) berasal dari keluarga miskin / rentan miskin; dan (3) belum mendapatkan bantuan sosial yang lain.

Strategi komunikasi dibutuhkan di dalam implementasi suatu program komunikasi supaya tujuan komunikasi tercapai secara efektif. Demikian pula dalam proses pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar, Dinas Sosial Kabupaten Sleman juga menggunakan strategi komunikasi yang digunakan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, Dinas Sosial melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan). Dengan melibatkan TKSK dan TPSK ini harapannya dapat membantu Dinas Sosial dalam

menjalankan program yang sudah direncanakan.

TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) merupakan unit kerja yang membantu mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan sosial dan permasalahan masyarakat miskin di tingkat kapanewon. TKSK merupakan koordinator setiap kapanewon di Kabupaten Sleman yang menjadi jembatan informasi antara Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan pemerintah kapanewon. Melalui TKSK ini pemerintah kapanewon memperoleh segala informasi mengenai bantuan sosial masyarakat dan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara itu Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) merupakan tenaga kerja lapangan yang bertugas untuk membantu TKSK dalam menjembatani informasi antara Dinas Sosial dan pemerintah kalurahan. Sejatinya, Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) ini merupakan seorang pendamping sosial yang ditempatkan pada sebuah kalurahan dan menjadi anggotadari TKSK.

Ketika menjalankan tugas dalam pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar di setiap kapanewon, TKSK dan TPSK ini juga menemui beberapa kendala. Berdasarkan fakta di lapangan, Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan (TPSK) yang bertugas sebagai ujung tombak dari Dinas Sosial seringkali memiliki kesalahpahaman dalam menangani pelaksanaan program yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam mengoptimalkan program Lanjut Usia Terlantar (LUT).

Menurut hasil wawancara dari Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), terkadang pihak Dinas Sosial Kabupaten Sleman selalu menuntut TPSK untuk selalu cepat dalam mengkoordinasikan proses pendataan identitas calon penerima sampai dengan pelaksanaan bantuan sosial Lanjut Usia Terlantar (LUT). Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai tenaga yang bekerja di lapangan dan menghadapi situasi kondisi selama penyaluran bantuan sosial, TPSK dan TKSK sering mendapati beberapa kendala yang berasal dari pelaksana program Lanjut Usia Terlantar (LUT) maupun penerima bansos Lanjut Usia Terlantar (LUT). Sebagai salah satu contoh, dalam penyaluran bantuan sosial Lanjut Usia Terlantar di Kapanewon Minggir mengalami kendala

dimana penerima bantuan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan sosial terkait yang disebabkan oleh salah satu TPSK yang tidak memberikan informasi akan persyaratan pencairan bantuan sosial serta tidak pendamping pelaksanaan pencairan bantuan sosial. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan pelaksanaan pencairan bantuan sosial Lanjut Usia Terlantar (LUT) menjadi kurang kondusif dan efektif.

Selain itu kendala dari program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini juga berasal dari penerima bantuan. Dikarenakan sudah memiliki usia yang cukup tua, terkadang pada saat melakukan verifikasi dan validasi data TPSK mengalami kendala yaitu penerima tidak memiliki ingatan yang cukup baik. Hal ini tentu saja berpengaruh pada proses pendataan identitas calon penerima tersebut. Sering dijumpai calon penerima bantuan Lanjut Usia Terlantar sering lupa bahwa dirinya pernah mendapatkan bantuan sosial. Sehingga pada saat dilakukan verifikasi, calon penerima tersebut mengatakan belum mendapatkan bantuan sosial, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata calon penerima tersebut telah mendapatkan bantuan sosial. Hal ini juga menjadi kendala dalam program Lanjut Usia Terlantar (LUT) karena dapat menyebabkan terjadinya double bantuan. Apabila penerima bantuan mendapatkan double bantuan maka akan menjadi suatu permasalahan yang cukup riskan, dikarenakan dalam peraturan bantuan sosial, penerima tidak boleh mendapatkan bantuan sosial lebih dari satu.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi, diperlukan strategi komunikasi yang dapat digunakan membantu mengatasi permasalahan pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT). Untuk memperoleh pengetahuan mengenai fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar di Sendangmulyo.”

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti secara lebih rinci, jelas dan detail. Moleong (2017:6) mendefinisikan pendekatan

kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, bahasa maupun tulisan. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kualitas dan bukan pada kuantitas data, sehingga perolehan hasil data didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti berperan sebagai pengamat yang mengamati fenomena serta gejala yang ada kemudian mencatatnya dalam buku observasi.

### **Setting Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Sendangmulyo, sehingga lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. Parasmya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kalurahan Sendangmulyo Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data utama dikumpulkan dari informan melalui teknik wawancara secara langsung di lokasi penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu: (1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman yaitu Eko Suhargono, S.IP; (2) Sub Koordinator Kelompok Substansi Data Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sleman yaitu Sarastomo Ari Saptoto, S.Sos, MAP, M.Agr.Sc; (3) Sub-Koordinator Kelompok Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial yaitu Gunadi, S.ST; (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu Masykuri, S.Ag; (5) Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan yaitu Aulia Damayanti. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Sleman berupa data kemiskinan Kabupaten Sleman, Data dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta, dan data dokumen dari Kalurahan Sendangmulyo.

### **Metode dan Instrumen Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data utama yang digunakan yaitu wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini dipilih berdasarkan jabatan ataupun orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2019:133).

Sedangkan metode pengumpulan data penunjang melalui observasi dan dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa data-data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman terkait dengan Program Lanjut Usia Terlantar.

#### **Keabsahan Data**

Untuk menghindari kekeliruan dari data yang terkumpul maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi sumber. Wijaya (2018:120-121) menjelaskan bahwa triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Teknik triangulasi sumber ini merupakan proses pengecekan terhadap data yang ada dan dapat digunakan sebagai pembanding. Triangulasi sumber digunakan untuk memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

#### **Analisis Data**

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) mengungkapkan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pencarian data sampai dengan selesainya pengumpulan data dalam suatu periode tertentu. Dalam penelitian kualitatif terdapat 3 tahapan analisis data yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan wawancara lebih lanjut, rumusan masalah di dalam penelitian terjawab yaitu tentang bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Program Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Kalurahan Sendangmulyo. Berdasarkan hasil tersebut maka pembahasan sebagai berikut:

#### **Perencanaan Komunikasi Yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT)**

Program lanjut usia terlantar ini

merupakan rangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Program LUT merupakan program pemerintah yang dianggarkan melalui dana anggaran APBD Kabupaten Sleman yang memberikan jaminan sosial untuk membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidup. Tujuan adanya program lanjut usia terlantar adalah: (1) Menyalurkan dana bantuan sosial kepada peserta program; (2) Memenuhi sebagian kebutuhan dasar lanjut usia terlantar; (3) Melaksanakan pendampingan psikososial kepada lanjut usia terlantar.

Dalam mencapai tujuan program LUT, Dinas Sosial melibatkan TPSK dan TKSK untuk mengoptimalkan pelaksanaan program lanjut usia terlantar. Dinas Sosial kabupaten sleman melibatkan TPSK sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) nomor 027/01/SPK/Jasa Lain\_TPSK/2023 untuk menjadi tenaga pendamping pelaksanaan program dinas sosial, salah satunya program Lanjut Usia Terlantar.

Pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar di Sendangmulyo berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan memiliki jumlah penerima program Lanjut Usia Terlantar sejumlah empat penerima pada tahun 2021 dan tiga penerima pada tahun 2022, menunjukkan bahwa suatu daerah yang memiliki tingkat persentase tinggi belum tentu memiliki jumlah penerima program LUT dengan jumlah yang tinggi pula. Hal ini juga disampaikan oleh Sub Koordinator Kelompok Substansi Rehabilitasi Tuna Sosial yang menjelaskan bahwa kalurahan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi belum tentu memiliki jumlah penerima program LUT. Selain itu menurut salah satu informan yaitu TPSK Sendangmulyo menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sudah merata pada lapisan masyarakat yang berada di kalurahan sendangmulyo. Sehingga jumlah penerima dalam program LUT ini terbilang sedikit.

#### **Komunikasi Yang Dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Mengkoordinasikan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT) kepada Para Tenaga Lapangan**

Berdasarkan temuan yang ada terdapat manajemen komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengoptimalkan program LUT di Sendangmulyo ini diantaranya:

a. Komunikasi tatap muka

Komunikasi tatap muka merupakan komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa melalui media/ perantara. Komunikasi ini juga disebut sebagai komunikasi *face to face*. Berdasarkan hasil temuan, dalam mengkoordinasikan TPSK dalam pelaksanaan program LUT, Dinas Sosial Kabupaten Sleman melakukan komunikasi secara tatap muka dengan TPSK. Dalam hal ini sebelum pelaksanaan program LUT, para TPSK diberikan arahan terlebih dahulu mengenai teknis pelaksanaan program LUT mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran program LUT.



Gambar 3.1. Proses pengarahan TPSK mengenai pelaksanaan program LUT  
Sumber: Dokumentasi TPSK Sendangmulyo

Dengan memberikan arahan dan melakukan komunikasi secara langsung dengan para TPSK ini, akan mempermudah informasi yang tersalurkan dari pihak Dinas Sosial dengan TPSK. Hal ini dikarenakan ketika Dinas Sosial memberikan arahan kepada TPSK secara langsung, akan dapat langsung mengetahui apakah TPSK dapat memahami informasi yang disampaikan. Selain itu dengan melakukan komunikasi secara langsung melalui suatu pertemuan ini juga akan meminimalisasikan adanya kesalahpahaman informasi. Apabila pesan yang disampaikan oleh Dinas Sosial belum dipahami oleh para TPSK, maka pihak Dinas Sosial

Begitu pula dengan temuan yang ada dilapangan. Ketika TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan)

menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar (LUT) kepada penerima program LUT secara langsung, sehingga dengan disampainya berbagai informasi terkait pelaksanaan program tersebut, para penerima program LUT tersebut akan lebih memahami informasi yang disampaikan.

b. Komunikasi Bermedia

Media yang digunakan Dinas Sosial dalam menjembatani informasi antara pihak Dinas Sosial dengan TPSK adalah media sosial whatsapp. whatsapp merupakan media sosial yang sering digunakan pihak Dinas Sosial dalam melakukan monitoring pelaksanaan program LUT. Berbagai jenis komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman tersebut bertujuan agar pesan atau informasi yang disampaikan kepada TPSK dapat tercapai dengan efektif. Dalam penelitian ini, Dinas Sosial kabupaten sleman menggunakan Teknik penyampaian pesan informatif kepada para tenaga lapangan.

Berdasarkan temuan di lapangan, Dinas Sosial memberikan pesan yang informatif kepada para tenaga kerja lapangan mengenai teknis dari pelaksanaan program LUT, mulai dari tahap pendataan penerima program, tahap verifikasi, hingga tahap pelaksanaan penyaluran program LUT. Informasi yang disampaikan TPSK kepada penerima tersebut meliputi informasi waktu, tempat dan kelengkapan administrasi (KTP dan KK) yang dibutuhkan pada pelaksanaan penyaluran program LUT.

**Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT)**

Dalam program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan yaitu Tahap pertama, Tahap pendataan. Pada tahap pendataan ini masing-masing kalurahan dapat mengusulkan warga yang dikategorikan kalangan lanjut usia yang tidak mampu untuk dapat diusulkan sebagai calon penerima Lanjut Usia Terlantar sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini TPSK membantu menginformasikan kepada pemerintah kalurahan mengenai kriteria dari calon penerima program Lanjut Usia Terlantar. Kemudian dari pihak pemerintah kalurahan melalui TPSK akan mengusulkan beberapa nama calon penerima program Lanjut

Usia Terlantar ke Dinas Sosial.

Tahap kedua, tahap penyandingan data. Setelah dilakukan pendataan, data yang diperoleh tersebut akan disandingkan dengan data bantuan sosial lain agar tidak terjadi double bantuan sosial. Penyandingan data ini tidak hanya dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Sleman saja, akan tetapi juga dilakukan penyandingan data bantuan di tingkat kalurahan. Dalam tahap penyandingan data ini, TPSK juga membantu memfasilitasi data yang akan digunakan untuk menyandingkan data program Lanjut Usia Terlantar dengan program Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang lain.

Tahap ketiga, verifikasi dan validasi data. Setelah data sudah disandingkan dengan bantuan program lain maka TPSK akan melakukan survey dilapangan untuk mengetahui kondisi calon penerima program Lanjut Usia Terlantar. Dalam hal ini TPSK melakukan survey menangani kondisi rumah yang terdiri dari atap, lantai, tembok, kamar, kamar mandi calon penerima. Apabila berdasarkan hasil survey tersebut, calon penerima memang pantas untuk diberikan bantuan program Lanjut Usia Terlantar, maka TPSK dapat memberikan verifikasi "layak" pada calon penerima tersebut. Setelah itu hasil survey dikembalikan lagi ke Dinas Sosial untuk ditetapkan menjadi penerima program Lanjut Usia Terlantar. Setelah ditetapkan menjadi penerima program Lanjut Usia Terlantar, Dinas Sosial juga melakukan kerjasama dengan Bank Sleman untuk pembuatan rekening calon penerima.

Tahapan keempat adalah penyaluran program Lanjut Usia Terlantar. Penyaluran program LUT ini dilaksanakan selama dua kali dalam satu tahun yang berjumlah satu juta rupiah. Sebelum penyaluran program LUT ini, Dinas Sosial terlebih dahulu akan mengumpulkan TPSK atau yang merupakan pendamping dari penerima LUT untuk diberikan arahan mengenai penyaluran bantuan program LUT. Dalam hal ini TPSK akan diberikan arahan mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan atau persyaratan dalam penyaluran program LUT. Pada tahap ini, TPSK akan menyampaikan informasi kepada para penerima LUT mengenai apa saja yang harus dibawa saat penyaluran seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Pada pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar ini efek yang didapatkan para TPSK setelah mendapatkan arahan dari pihak

Dinas Sosial adalah efek kognitif. Efek kognitif merupakan efek yang tumbul pada diri TPSK yang bersifat informatif bagi dirinya. Hal ini dikarenakan, setelah mendapatkan arahan dari pihak Dinas Sosial, para TPSK mendapatkan informasi mengenai teknis pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar mulai dari pendataan sampai dengan penyaluran bantuan program Lanjut Usia Terlantar.

### **Faktor Penghambat atau Kendala dalam Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT)**

Dalam melaksanakan Program Lanjut Usia Terlantar secara efektif tentu tidaklah mudah. Meskipun, Dinas Sosial Kabupaten Sleman telah meminimalisasikan hal yang dapat menghambat pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar, akan tetapi masih terdapat faktor penghambat yang muncul. Kendala dalam komunikasi ini biasanya terjadi pada waktu penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan yang terjadi karena tidak tercapainya maksud atau pesan yang ingin dikehendaki. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program LUT adalah Hambatan Semantik. Hambatan semantik merupakan pemaknaan yang berbeda atas penyampaian pesan yang dilakukan komunikator dengan komunikan. Dalam penelitian ini hambatan semantik yang terjadi antar TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) dengan pihak Dinas Sosial adalah kesalahpahaman yang muncul pada saat diberikan arahan melalui whatsapp group. Pada saat diberikan arahan mengenai pelaksanaan program LUT, terkadang TPSK masih kurang memahami arahan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial. Hal ini terjadi perbedaan pemahaman mengenai informasi antara komunikasi secara langsung tatap muka atau hanya melalui chat whatsapp.

Selain dengan TPSK, kesalahpahaman ini juga terjadi antara Dinas Sosial dengan jejaring kerja seperti salah satunya Bank Sleman dalam pelaksanaan penyaluran program LUT. Seperti yang diungkapkan TKSK Kapanewon Minggir, bahwa dalam pelaksanaan penyaluran program LUT, terdapat miscommunication antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Sleman dan Bank Sleman. Miscommunication tersebut biasanya mengenai informasi dan teknis dalam implementasi penyaluran program LUT. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara bahwa terjadi

kesalahpahaman dalam pengambilan bantuan dikarenakan Bank Sleman tidak memberikan informasi terkait perubahan lokasi sehingga teknis di lapangan menjadi tidak kondusif dan tentunya menghambat implementasi dari program Lanjut Usia Terlantar (LUT).

#### **Evaluasi Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT)**

Program Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Kalurahan Sendangmulyo berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman perlu meningkatkan strategi yang digunakan pada implementasi program Lanjut Usia Terlantar (LUT) supaya tujuan akan tercapai dengan lebih maksimal dan efektif. Menurut hasil temuan melalui wawancara, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman terhadap TSKS dan TPSK masih terbatas koordinasi secara umum melalui media whatsapp group. Sosialisasi tatap muka antar pihak yang terlibat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi secara intens sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di dalam pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar (LUT).

Kemudian berdasarkan hasil temuan dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman tidak memiliki waktu atau tanggal yang spesifik dalam program Lanjut Usia Terlantar (LUT). Hanya saja diberikan tenggang waktu sehingga implementasi penyaluran program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini kurang efisien dan tersistem. Namun terdapat peningkatan kualitas program Lanjut Usia Terlantar (LUT) dari tahun ke tahun. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman memperhatikan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya sebagai suatu proses peningkatan kualitas sehingga pelaksanaan program LUT dari tahun ke tahun semakin lebih baik.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar di Sendangmulyo, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan Dinas Sosial

Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar (LUT) sebagai berikut: **Pertama**, dalam pelaksanaan program LUT yang menjadi komunikator adalah Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) dan TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). **Kedua**, Dinas Sosial Kabupaten Sleman menyusun pesan mengenai informasi teknis pelaksanaan program LUT, mulai dari tahap pendataan sampai dengan penyaluran program LUT. Dalam penyampaian pesan, Dinas Sosial Kabupaten Sleman menggunakan teknis penyampaian pesan informatif dikarenakan memberikan informasi kepada TPSK dan TSKS mengenai teknis pelaksanaan program LUT. **Ketiga**, komunikasi dalam pelaksanaan program LUT ini adalah TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan), TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) serta penerima Program Lanjut Usia Terlantar. Dalam pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar, TPSK (Tenaga Pendamping Sosial Kalurahan) dan TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) menjadi komunikator sekaligus komunikasi dikarenakan menerima informasi dari Dinas Sosial dan memberikan informasi mengenai program LUT kepada penerima program LUT. **Keempat**, dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Lanjut Usia Terlantar, Dinas Sosial Kabupaten Sleman menggunakan media komunikasi whatsapp sebagai media komunikasi dengan TPSK sekaligus menjadi media monitoring. **Kelima**, efek yang diperoleh dari pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini adalah efek kognitif, dimana komunikasi mendapatkan efek yang timbul bersifat informatif bagi dirinya terkait dengan informasi pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar.

Melalui strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Sleman ini sudah bisa dinyatakan berhasil dalam mengoptimalkan pelaksanaan program Lanjut Usia Terlantar. Implementasi penyaluran program Lanjut Usia Terlantar (LUT) ini kurang efisien dan tersistem. Namun terdapat peningkatan kualitas program Lanjut Usia Terlantar (LUT) dari

tahun ke tahun. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Sleman memperhatikan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya sebagai suatu proses peningkatan kualitas sehingga pelaksanaan program LUT dari tahun ke tahun semakin lebih baik.

2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program lanjut usia terlantar ini adalah hambatan semantic. Hambatan semantic ini muncul karena adanya kesalahpahaman dalam memaknai pesan yang disampaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, M. F., Hunawa, R., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kapanewon Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379- 396.
- Aw, S (2019). *Perencanaan dan Evaluasi Program Komunikasi*. Yogyakarta: Pena Presindo
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Presentase Penduduk Miskin Tahun 2022. [bps.go.id](https://www.bps.go.id).  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Darisman, T. (2022). *Strategi Komunikasi Public Relation Mengenai Pencemaran Limbah Industri* (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS).
- Effendy, Onong Uchjana. 2020. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Haryanisa, L. H. (2020). *Strategi Komunikasi Pelatih Pada Atlet Persiapan Pertandingan Klub Taekwondo Mandala Ganesha Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Hs, A. I. (2012). *Strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam menghadapi perubahan iklim*. *Jurnal Riptek*, 6.
- Humas MENPANRB.(2022).“Beragam Upaya Mengurai Permasalahan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia”,<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beragam-upaya>
- mengurai-permasalahan-pengentasan-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia, diakses pada 18 Januari 2022 pukul 10.05
- Juliansyah, E. (2017). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi*. *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19-37.
- Junaidi, M. (2013). *Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Program Samarinda Hijau Bersih Dan Sehat (HBS) PADA RT 07 KALURAHAN MUGIREJO*.
- KHUSNA, R. R., & ADNANI, K. (2020). *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Ngawi Dalam Mengatasi Masalah Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Ngawi Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh)* (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67-83.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan: sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1-14.
- Nando Caesar, U., Toni, H., & Yumiarti, Y. (2021). *Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Nikmah, S., & Rahaju, T. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Surabaya*. *Publika*, 9(3), 195-210.
- Nurhikmawati, A. (2015). *Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Tamangapa Kapanewon Manggala* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45-53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>.
- Putri, N. C., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan

- Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 1-15.
- Ras, A. A. (2013). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 56-63.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3).
- SHOLIHAN, M. A. (2016). Strategi Komunikasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kapanewon Kabat Kabupaten Banyuwangi (Doctoral dissertation, IAIN JEMBER).
- Susiatun, E. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007- 2016. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 141.
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. Lentera, 17(1)